

Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar

Tati Hartimah*

Abstract: Rohingya tribe lived in jungles spread in Arakan, Myanmar since 8th century, were Muslim. They were considered as the second class citizen came from Banglades, treated inequally, and rejected to be part of the country. This condition continued from 18th century up to now. This condition is a result of Burma ethnic domination (Tibeto-Burmans) which then became the military regime. Through Rohingya Solidarity Organization (RSO) established in 1980, Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) established in 1987, and Rohingya National Alliance (RNA), the tribe has started to go against the regime.

Kata Kunci: Rohingya, Myanmar, dan Banglades.

BAGI sebuah komunitas yang telah lama berada dalam situasi terjajah, penciptaan sebuah identitas bersama tak ayal menjadi agenda utama yang pastinya selalu diharapkan oleh segenap elemen masyarakatnya. Peran inilah yang dimainkan Muslim Rohingya. Sejak hadir di belantara wilayah Arakan, Myanmar, sekitar abad ke-8 M (788 M), mereka dianggap hanya sebagai pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris dari Banglades dan bukan bagian dari raturan ras nasional yang menyatu dalam Uni Myanmar.¹ Kesamaan fisik mereka dengan orang Banglades seringkali menjadi alasan kuat bagi pihak peme-

*Jurusan/Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

rintah untuk menempatkan mereka sebagai warga kelas dua (*second class*) yang memperoleh perlakuan diskriminatif, ditolak status kewarganegaraannya, dibatasi aktivitasnya di pelbagai bidang kehidupan, dilibatkan dalam skema kerja paksa, disiksa, ditahan, bahkan diusir dari tanah kelahirannya.

Kondisi ini berjalan laten hingga beberapa abad, mulai dari awal kali pemerintahan Myanmar terbentuk sekitar abad ke-18 hingga saat ini. Berita terdamparnya mereka di Indonesia pada Januari 2009 bukanlah cerita baru tentang nasib komunitas minoritas Muslim di Asia. Namun menjadi cerita yang untuk kesekian kalinya terkuak dalam kehidupan masyarakat Asia. Seperti halnya berita manusia perahu dari Vietnam ataupun manusia gunung dari Afghanistan, Muslim Rohingya pun mengalami hal yang sama, mengungsi, meninggalkan tanah kelahirannya guna melepaskan diri dari kejamnya kekuasaan.

Tulisan ini akan membahas secara historis munculnya Muslim Rohingya yang

menurut beberapa referensi, telah hadir di Myanmar, tepatnya di wilayah Arakan, sejak abad ke-8 M. Pertanyaannya mengapa eksistensi mereka yang *notabene* telah ada sejak beberapa abad lamanya, seperti ternafikan dengan mudah karena kuatnya dominasi komunitas tertentu. Tulisan ini juga berupaya melacak dinamika perjuangan mereka dalam memperjuangkan identitas sosial, termasuk nasib hidup, yang seakan tidak bermakna, penuh trauma, dan berada dalam ketakutan.

Deskripsi Umum Myanmar

Myanmar terletak di antara India dan Banglades di sebelah timur, Tibet di selatan, Yunan di utara, dan Laos di sebelah timur. Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas 678.500 km persegi, diketahui memiliki sejarah pembentukan yang panjang dan penuh pergolakan. Sejak abad ke-16, atas limpahan sumber daya alam yang tersebar di wilayahnya, negara ini diperebutkan oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis.

Hingga kini, selain memiliki tanah yang subur untuk pertanian -75% penduduknya bergantung pada usaha bercocok tanam-, negara yang berpopulasi sekitar 54 juta jiwa ini ditengarai sebagai negara yang relatif kaya akan sumber daya alam mulai dari minyak bumi -mencakup minyak dan gas bumi, timah, zink, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gamping, dan marmer-, hingga pelbagai pernik sepesial seperti kayu jati, giok, mutiara, delima, rubi, ataupun safir.

Kelompok terbesar dalam masyarakat Myanmar adalah Burmans (Tibeto-Burmans) -yang secara etnik memiliki kekerabatan dengan orang Tibet dan Cina dan berkisar sekitar 65%-, Shans (Thai-Shans) etnik Thai yang awalnya merupakan imigran asal Cina dan berjumlah sekitar 4 juta jiwa (10%), Mon (Mon-Khmers) dan Arakanese (Rakhine), sekitar 4% dari total penduduk. Sedangkan komunitas yang tergolong minoritas di antaranya; Karens, Kayah, Rakhine, Chin, Kachins, Nagas serta 130 etnis lainnya.² Mereka secara umum

terbagi dalam beberapa keyakinan keagamaan utama, seperti Theravada Budha (70%) -mayoritas dianut oleh komunitas Burma, Shan dan Mon-, Islam (15%) mayoritas dipeluk oleh komunitas Rohingya di Arakan (pantai Timur), Kristen (8%) dianut oleh komunitas Kachin, Chin, Nagas, Karens, dan Kareni, serta Hindu yang dipeluk oleh komunitas India, Tamil, dan Bengali.³

Dalam kerangka sosiologis, dominasi komunitas Burma (Tibeto-Burmans) -menjelma dalam struktur pemerintahan- atas minoritas lain, terkadang menimbulkan problem bagi rancang kehidupan masyarakat Myanmar. Bahkan sebagian kelompok etnis yang mewakili beberapa daerah di Myanmar, dalam sejarahnya pernah terlibat dalam sebuah aksi pemberontakan menentang dominasi itu. Pada 1949 etnis Karens berupaya melepaskan diri untuk selanjutnya membentuk negara tersendiri. Namun, pelbagai tantangan yang hadir -termasuk ketika seorang wakil etnis Karens *notabene* terpilih sebagai presiden Burma- membuat gerakan ini hilang dengan sendiri-

nya. Pun demikian yang dijanjikan komunitas Arakan dan Mons pada kisaran 1950an.⁴

Ketegangan etnik yang meningkatkan pemberontakan dari kelompok separatis, terlihat menjadi permasalahan utama bagi Myanmar yang faktanya, sangat sulit terselesaikan hingga kini. Termasuk dalam konteks ini adalah konflik yang berlangsung antara etnis Burma (representasi pemerintah) di satu sisi dengan Muslim Rohingya (etnis Arakan) di sisi lain.

Akar Historis Muslim Rohingya di Arakan

Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya, selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Pengalaman sejarahnya sebagai wilayah yang telah dikuasai secara bergilir oleh beragam komunitas,⁵ semakin mengukuhkan perannya seba-

gai wilayah penting bagi terbentuknya peradaban Myanmar secara umum.

Secara demografis, Arakan terletak di sebelah barat Myanmar, tepatnya di pesisir timur Teluk Bengal. Awalnya, propinsi ini memiliki luas wilayah 20.000 km persegi. Namun pada perkembangannya, luas wilayahnya menyusut menjadi hanya 14.200 km persegi. Berpenduduk sekitar 5 juta penduduk yang dikenal dengan sebutan Rakhaing. Wilayah ini berbatasan dengan India di sebelah utara, negara bagian Chin di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di timur, distrik Irrawady di selatan dan Banglades di barat laut.⁶

Arakan terbagi dalam dua etnis utama, Rohingya dan Rakhine/Maghs. Jika Rakhine dikenal sebagai komunitas etnis yang mayoritas masyarakatnya adalah penganut Budha, maka etnis Rohingya yang Muslim itu, secara fisik, bahasa, dan budaya memiliki kemiripan dengan orang Bengal, Banglades.

Muslim Rohingya -khususnya yang mendiami Arakan- berjumlah sekitar 3,5 juta jiwa. Ini merupakan sebaran

dari 7 juta jiwa etnis Rohingya yang keseluruhannya tersebar di 4 kota Myanmar lainnya seperti Maungdaw, Buthidaung, Akyab dan Kyaunktaung. Secara geneologis, Muslim Rohingya berasal dari beberapa garis keturunan -meliputi Arab, Moor, Persia, Turk, Mughal, Pathan. Banglades, Rakhine, Chakmas, Belanda, dan Portugis- yang kesemuanya tersebar di 4 ragam komunitas seperti; Chittagong Bengal di perbatasan Mayu, keturunan Muslim Arakan yang hidup di masa Dinasti Mrauk-U (1430-1784) namun kini menetap di propinsi Mrauk-U dan Kyauktaw; keturunan Muslim Ramree yang kini dikenal sebagai komunitas Kaman; dan penduduk Muslim yang berasal dari daerah Myedu di pusat kota Burma.⁷

Kehadiran Islam di Arakan sudah sejak abad ke-8 M melalui kehadiran Mohammed Hanifa, namun sejarah munculnya Muslim Rohingya memperoleh momentumnya ketika Arakan dikuasai raja Naramaikhla. Setelah sempat memimpin Arakan pada akhir abad ke-14, ia menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa

Burma pada 1404. Kondisi ini tidak berjalan lama, karena ketika pada 1429, Jalaluddin Mohammed Shah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sementara kerajaan Bengal, meminta kepada raja Naramaikhla untuk menyiapkan pasukan guna kembali merebut wilayah Arakan dari bangsa Burma. Dengan 50.000 pasukan di bawah komando Wali Khan, pada 1430 mereka menaklukkan Kerajaan Burma dan kembali mendudukkan Naramaikhla sebagai pemimpin bangsa Arakan.⁸

Di bawah raja Naramaikhla, Arakan menjadi negara Islam. Meskipun Naramaikhla penganut Budha, namun persinggungannya dengan kebudayaan Bengal (Gaur) membuatnya sangat menghormati agama Islam. Selain mengganti namanya menjadi nama Islam, Sulaiman Syah, ia juga memunculkan beberapa kebijakan penting seperti: memindahkan ibukota wilayah ke Mrauk-U atau Pattahri Quilla pada 1433 dan menjadikan bahasa Persia sebagai bahasa nasional mereka.⁹

Dalam batas ini, Arakan menjadi kesultanan yang terli-

hat sangat intens bersentuhan dengan peradaban moderen. Pada era ini mereka seperti berada pada masa Renaissance yang penuh progresivitas dan mengantarkan Arakan sebagai tanah pijakan kaum Muslim Bengal dalam rentang periode 1430 hingga 1530 M. Sejarah mencatat, bahwa mulai abad ke-14-15, Arakan menjadi wilayah Islam yang kuat. Islam dianut oleh sebagian besar masyarakatnya yang *notabene* adalah etnis Rohingya.

Awal Runtuhnya Kesatuan Etnis

Kondisi tersebut berlangsung hingga 350 tahun dan berakhir pada 24 September 1784 M ketika raja Boddaw Paya dari Burma -penganut Budha- menginvasi Arakan dan menguasainya. Sejak saat itu, Muslim Rohingya di Arakan berada pada posisi subordinat dan selalu mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa Burma. Dimulai dengan upaya pengikisan pelbagai infrastruktur keislaman seperti menghancurkan masjid dan mengubahnya dengan pagoda atau mengubah mad-

rasah menjadi Kyang -lembaga keagamaan kaum Budhah pihak penguasa juga berupaya melancarkan aksi-aksi yang cenderung merugikan Muslim Rohingya. Selain terkekang secara politis -tidak diakui sebagai warganegara-, mereka mengalami perlakuan diskriminatif baik dalam ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Kondisi ini sedikit mereda pasca pecahnya perang Anglo-Burma pertama pada 1824-1826. Karena sesuai Perjanjian Yandabo tertanggal 24 Februari 1826, maka Burma, Arakan, dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Ini berarti, baik Burma ataupun Arakan masuk dalam satu kekuasaan British-India dan tentunya berakibat pada dilindunginya Muslim Rohingya dari bentuk perlakuan diskriminatif yang pernah dialami sebelum diberlakukannya ratifikasi perjanjian ini. Namun, berdasarkan pada Government of India Act tahun 1935, diputuskanlah bahwa mulai 1 April 1937, Burma terpisah dari British-India, dan selanjutnya, secara *de facto* Arakan menjadi bagian dari British-Burma.¹⁰

Dari sinilah penderitaan Muslim Rohingya semakin mengental. Terlebih ketika pada 1948, Burma secara *de jure* memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Proses kemerdekaan ini dimulai ketika jenderal Aung San -ayah tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi- dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma, sepakat untuk menandatangani perjanjian penyatuan Burma tanggal 12 September 1947 yang bertempat di Pinlong, propinsi Shan. Kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris dan membentuk negara federal Burma yang terdiri atas propinsi (negara bagian) sesuai dengan komposisi etnis yang ada.

Momen penting tersebut faktanya sama sekali tidak melibatkan Muslim Rohingya yang *notabene* merupakan penduduk pribumi setempat. Tidak ada satupun perwakilan etnis Rohingya yang diundang untuk menghadiri peristiwa besar tersebut. Berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan propinsi sendiri, etnis Rohingya kehilangan haknya, bahkan wilayahnya,

Arakan, diserahkan kepada etnis Rakhin yang beragama Budha, walaupun populasinya kurang dari 10% penduduk Arakan. Sejak saat itulah hak-hak etnis Rohingya berusaha dihilangkan oleh para politisi Budha Burma.

Berkuasanya Junta Militer

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan sejak jenderal Ne Win -pemimpin militer sayap kiri Burma- melancarkan aksi kudeta militer guna menghancurkan kekuasaan pemerintah Burma di bawah PM U Nu pada 1962. Di bawah pengaruhnya Myanmar berubah dari negara beriklim demokratis menjadi negara berideologi sosialis.¹¹

Guna mengontrol tata kehidupan bernegara masyarakatnya, junta militer memberlakukan pelbagai kebijakan yang cenderung sentralistik. Misalnya, menerapkan peraturan ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Budha yang *notabene* dijadikan agama resmi negara. Situasi ini membawa akibat pengimplementasian hak kebebasan beragama bagi agama minoritas di negara itu menja-

di sangat terbatas. Ini yang dirasakan komunitas Muslim Rohingya. Sejak berada dalam naungan kekuasaan junta militer, keadaan Muslim Rohingya semakin memburuk, bukan saja terkekang secara politis, tetapi juga dalam pemenuhan atas beragam hak ekonomi, sosial, budaya utamanya hak beragama.

Fakta atas diberlakukannya Operasi Raja Naga (Nagamin), dimulai sejak Pebruari 1978, setidaknya memperjelas kondisi tersebut. Bahwa secara politik misalnya, selain tidak memperoleh hak kewarganegaraan dan hanya dianggap sebagai imigran ilegal, mereka juga dilarang untuk terlibat dalam segala aktivitas politik, termasuk untuk mendirikan partai politik. Mereka juga tidak memperoleh kebebasan untuk bepergian ke suatu daerah. Untuk pergi keluar desa atau ke luar negeri mereka harus mendapat izin dari otoritas lokal, yang faktanya sangat sulit dilakukan. Walaupun mereka diizinkan untuk bepergian, segala hambatan sudah pasti akan mereka hadapi, seperti sulitnya meng-

urus paspor, atau pembatasan masa berlakunya visa.¹²

Selain itu etnis Rohingya di Arakan utara selalu difungsikan sebagai pekerja paksa. Dengan dalih membentuk *community work*, mereka dipaksa untuk mengerjakan pelbagai bangunan infrastruktur yang dibutuhkan pihak junta seperti, jalan raya, jembatan, ataupun bangunan-bangunan publik lainnya.

Secara ekonomis, pihak junta menolak memberikan izin usaha bagi etnis Rohingya, sedangkan di sisi lain junta menerapkan pajak yang tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritasnya adalah petani dan nelayan. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak, dan properti milik etnis Rohingya saat ini telah disita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak. Selain itu, para petani, buruh pemotong kayu dan bambu, dan pekerja agribisnis, diharuskan untuk menjual segala produk mereka kepada agen yang telah ditunjuk pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan.¹³

Dalam bidang pendidikan, hal yang sama juga dite-

rapkan oleh junta di mana anak-anak etnis Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Myanmar dan melanjutkan pendidikan tinggi keluar Myanmar. Kalaupun ada yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat universitas, jumlahnya sedikit. Terkait akses pendidikan lain, -diberlakukan sejak 1973-Muslim tidak diizinkan menerima naskah bebas dari luar negeri. Ini menjadikan dimensi pendidikan komunitas Rohingya semakin mengkhawatirkan.

Bagi perempuan Muslim Rohingya, selain hanya dijadikan obyek seksual para tentara, mereka juga dipersulit jika hendak menikah. Jika dengan ini mereka menentang pihak junta, maka yang terjadi selanjutnya adalah pengusiran etnis Rohingya dari desanya sendiri. Ini yang menyebabkan sedikitnya 71.000 Muslim terusir dari tempat tinggal mereka pada 1 Mei 1978.¹⁴

Kekejaman lain yang dilakukan junta adalah melakukan pembunuhan etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan etnis Rohingya.

Selain itu, tanpa landasan hukum yang kuat, penyiksaan dan penahanan secara ilegal -dimasukkan ke dalam *camp* konsentrasi- dilakukan setiap hari di Arakan, sebagai akibatnya, ratusan etnis Rohingya hilang tidak berbekas.

Dalam bidang keagamaan, junta telah menghancurkan ratusan masjid dan madrasah. Bahkan selain al-Qur'an yang dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara, kitab-kitab tentang Islam juga terkadang disita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus makanan. Junta juga melarang Muslim ohingya untuk melakukan berbagai ibadah.¹⁵

Munculnya Perlawanan; Menguatnya Identitas Sosial

Bukan saja dialami komunitas Muslim, situasi demikianpun dialami komunitas-komunitas lainnya. Sejak pola pemerintahan represif diterapkan pihak junta militer kepada masyarakat, pergolakan menentang segala kebijakan pemerintah merebak di berbagai daerah. Terlebih ketika secara nasional -tepatnya dalam ren-

tang tahun 1987-1988- perekonomian Myanmar mengalami kehancuran, demonstrasi merebak di berbagai tempat. Selain menuntut kebebasan secara politik maupun beragama, mereka juga menginginkan terjadinya perbaikan hidup, utamanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan perekonomian dengan dilandasi kenyamanan menjadi sebuah kumpulan masyarakat.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ne Win mengaktifkan bala tentaranya guna menumpas setiap gerakan perlawanan (pro-demokrasi) yang muncul. Sebagai dampak atas kebijakan tersebut, tercatat lebih dari 3,000 orang tewas dalam enam pekan. Melihat ragam anarkisme yang berkembang serta diiringi ketakutan akan disintegrasi bangsa, jenderal Saw Maung berinisiatif untuk mengambil alih kekuasaan dan sebagai reaksi awal atas situasi tersebut, pada tanggal 18 September 1988 membentuk Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara, SLORC (State Law and Order Restoration Council).

Namun bagi komunitas Muslim Rohingya, peralihan pemerintahan tersebut nyata-nya tidak mengubah nasib mereka. Alih-alih mendapatkan perhatian dan perlindungan, rezim pemerintah Myanmar (SLORC) justru tidak menganggap Muslim Rohingya sebagai penduduk asli, terlebih warga negara Myanmar. Mereka dianggap sebagai manusia tidak bernegara atau orang tanpa kewarganegaraan (*stateless people*). Bahkan karena itu, mereka memberlakukan kebijakan anti Islam terhadap seluruh umat Muslim Rohingya. Lebih jauh, diketahui bahwa SLORC selalu berupaya memecah belah komunitas Muslim dengan komunitas Budha, dan salah satunya adalah dengan menyebarkan beragam pamflet bemuatan propaganda anti Muslim.

Salah satu pamflet yang pernah diterbitkan pihak junta yakni pamflet yang mengatasnamakan Front Pelajar Demokratik Seluruh Burma (ABS-DF). Dalam pamflet tersebut - secara umum berisi ajakan kepada seluruh umat Budha untuk melawan ekspansi Muslim Rohingya- tergambar bah-

wa orang-orang Islam melalui beragam aktivitas dakwahnya -termasuk melalui taktik berdarah (martir-syuhada)-, berupaya menguasai seluruh daerah di Myanmar seraya menghancurkan komunitas Budha secara umum seperti yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Karenanya, sebuah kewajiban bagi segenap umat Budha di Myanmar untuk mempertahankan agama, budaya, sejarah, dan ciri-ciri nasionalnya, menguatkan solidaritas, memboikot seluruh toko Muslim, tidak menikah dengan Muslim, melarang menjual tanah kepada Muslim, serta tidak berhubungan social dengan Muslim.¹⁶

Beragam kondisi itulah yang pada akhirnya memaksa komunitas Muslim Rohingya melakukan perlawanan. Bagi mereka yang tidak kuasa menahan kondisi tersebut, mengungsi ataupun mencari suaka ke berbagai negara menjadi pilihan rasional yang mereka jalani. Tercatat bahwa dalam rentang tahun 1991-1992, 300.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Banglades. Hingga kini sekitar 1,5 juta jiwa Muslim Rohingya berusaha

mencari suaka ke berbagai negara seperti Banglades (sekitar 600.000 orang), Pakistan (sekitar 350.000 orang), Saudi Arabia (sekitar 400.000 orang) dan 100.000 orang lainnya yang tersebar di Uni Emirat Arab, Thailand, Malaysia, ataupun Indonesia.

Sedangkan bagi mereka yang masih kuat bertahan, terbentuknya Rohingya Solidarity Organization (RSO) sekitar awal tahun 1980an, Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) pada tahun 1987, dan Rohingya National Alliance (RNA), menjadi bukti perlawanan mereka atas pihak pemerintah. Berita tewasnya 37 tentara Myanmar oleh kelompok RNA di Desa Takchaung dan Wayladaung pada tanggal 17-18 Pebruari 1996, setidaknya menjadi catatan khusus bagi arah perlawanan tersebut.¹⁷

Reaksi Internasional

Menarik dicatat adalah bahwa dari pelbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di berbagai kawasan dunia, pelanggaran HAM di Myanmar mendapat respons yang kuat dari

dunia internasional, tidak terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga ini diketahui sangat berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan HAM. Terkait kasus pengungsi Rohingya, seiring dengan diadakannya Resolusi 18 Desember 1992 Majelis Umum PBB, lembaga ini, melalui UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi), berupaya menyelesaikan konflik di Myanmar melalui pembentukan perjanjian antara UNHCR dengan pihak pemerintah Myanmar tahun 1993. Sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka UNHCR dengan dibantu oleh pihak pemerintah Bangladesh berupaya memulangkan para pengungsi ke Myanmar. Tetapi alih-alih mendukung program tersebut, para pengungsi justru menolak usaha itu, dan bahkan sekitar tahun 1997 - terhitung mulai tanggal 22 Juli - mereka justru melancarkan aksi mogok makan sebagai bentuk ketidaksediaan mereka kembali ke Myanmar. Maka, inilah yang pada akhirnya membuat Myanmar se-

makin disorot oleh dunia internasional.

Namun demikian, meskipun menghadapi berbagai tekanan dari dunia internasional, Myanmar seperti merasa bahwa segala kebijakan mereka atas Muslim Rohingya sudah tepat. Bahkan dalam sejarahnya, walaupun awalnya mendapatkan penolakan dari beberapa negara anggota, namun nyatanya Myanmar tetap diterima sebagai anggota ASEAN pada tahun 1997. ASEAN sendiri, selain menggunakan alasan non-intervensi terhadap perkara-perkara negara lain, juga melancarkan apa yang selanjutnya disebut pendekatan, *constitutive engagement*, sebuah pendekatan yang hendak memberikan kesempatan bagi siapapun, khususnya Myanmar, dengan tidak menghukum serta mengucilkan eksistensi Myanmar secara politik dan ekonomi, tetapi memberikan kepercayaan lebih baginya untuk membangun dan lebih memperhatikan kembali kondisi rakyatnya baik secara ekonomi maupun politik.

Dari motif tersebut, nyatalah bahwa ASEAN berupa-

ya menetralsir suasana dengan terus berusaha berpikir positif tentang Myanmar. Namun jika ditelisik lebih jauh, maka sebenarnya, motif diterimanya Myanmar sebagai anggota ASEAN lebih karena secara bilateral, Myanmar memiliki kedekatan dengan Cina. Negara inilah yang pro aktif mendorong dan mengupayakan agar Myanmar bergabung bersama ASEAN, sebagai konsekuensi strategi politik Cina yang selain hendak meningkatkan kekuatan militernya juga hendak mencari fasilitas pelabuhan di Teluk Bengal, Asia Selatan, dan di Samudera Hindia. Disinilah letak kekuatan Myanmar, dan alhasil menjadikan Myanmar sebagai negara yang seperti ini tidak pernah mempedulikan respons dari luar. Seringkali pemerintah mendapat teguran dari berbagai pihak, termasuk dari ASEAN, terkait pelbagai kebijakan pemerintahannya, namun tetap saja bahwa Myanmar seperti tidak pernah terjamah oleh ragam teguran tersebut.

Dalam konteks Muslim Rohingya, pihak pemerintah Myanmar justru sangat berpe-

gang teguh pada prinsip dasar yang mereka pegang. Bahwa Rohingya bukanlah golongan bangsa Myanmar, dan mereka hanyalah para imigran asal Bangladesh yang hanya berimigrasi ke Myanmar. Karena itulah yang terjadi adalah bahwa hingga kini, upaya yang dilancarkan pihak pemerintah terhadap etnis Rohingya adalah menghancurkan mereka secara sistematis. Untuk melegitimasi misi tersebut, dibuatlah beberapa alasan oleh pihak pemerintah Myanmar guna melancarkan program tersebut diantaranya; upaya menumpas keberadaan para gerilyawan Rohingya -terutama yang berasal dari Organisasi Solidaritas Rohingya dan Front Islam Rohingya Arakan- yang makin hari semakin berani menyerang pos-pos militer Myanmar di perbatasan dalam beberapa dekade belakangan ini.

Dari sanalah, kisah penangkapan dan pembunuhan warga Rohingya yang dicurigai menjadi gerilyawan atau membantu gerilyawan semakin kentara. Bukan hanya kepada pihak "pemberontak" kebijakan ini diberlakukan, te-

tapi juga kepada siapapun, termasuk warga sipil yang kesemunya itu dianggap sebagai gerilyawan. Alasan lain yang sering diutarakan pihak pemerintah Myanmar guna menghabisi generasi Rohingya yakni bahwa loyalitas orang Rohingya tidak dapat dipercaya karena sebagian besar dari mereka berusaha membuat negara merdeka di utara Arakan atau dalam batas tertentu, berusaha bergabung dengan Pakistan.

Masa depan Muslim Rohingya

Demikian, bahwa meskipun telah ada sejak beberapa abad lamanya, Muslim Rohingya dalam faktanya selalu dialienasi dari dunianya sendiri. Upaya peneguhan identitas sosial pada gilirannya menjadi agenda utama yang seakan tidak pernah padam dalam benak mereka. Bahwa mereka adalah kelompok minoritas dan selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah, itu sulit dinafikan, tetapi bahwa mereka bukan bagian dari Myanmar, jelas -dalam pandangan mereka- merupakan sebuah kesa-

lahan fatal yang faktanya dipercayai segenap elemen pemerintah Myanmar saat ini.

Inilah mengapa Myanmar sebagai sebuah negara, tidak luput dari beragam konflik kebangsaan. Perlakuan pihak junta (pemerintah) yang lebih menekankan kediktatoran kepada para warganya, tidak ayal semakin menyuburkan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang sarat konflik. Inilah posisi yang harus ditempati oleh segenap Muslim Rohingnya. Alih-alih menemukan kedamaian di negaranya sendiri, hingga kini, mereka justru seakan tersiksa dalam kubangan kediktatoran pihak junta. Untuk saat ini -dan sangat besar kemungkinan untuk beberapa dekade ke depan- sulit membayangkan Muslim Rohingnya hidup dalam bingkai kedamaian. Selama pihak junta memegang teguh ideologisasinya, jelas, tidak akan ada tempat yang ramah untuk Muslim Rohingnya. Maka, mengungsi, lari, dan mencari suaka ke berbagai negara, alhasil menjadi pilihan paling mungkin yang selanjutnya harus mereka jalani di kemudian hari.

Catatan Akhir:

1. Uni Myanmar dimaksudkan sebagai kesatuan kebangsaan bangsa Burma yang oleh karena alasan menjaga stabilitas nasional -dengan tidak hanya mengutamakan komunitas Burma-mengubah identitas kenegaraan dari awalnya bernama Burma menjadi Myanmar pada 18 Juni 1989. Lihat, Norman G. Owen (ed.), *The Emergence of Modern Southeast Asia, A New History*, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2005, h. 497-506.
2. Profil singkat beberapa komunitas tersebut, lihat, Norma Bixler, *Burma, a Profil*, London, Praeger Publishers, Inc. 1971, h. 119-146, Aung San Suu Kyi, *Freedom from Fear and other Writings*, England, Penguin Book Ltd. 1995, h.57-78.
3. Riza Sihbudi (ed.), *Problematisa Minoritas Muslim di Asia Tenggara, Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya*, Jakarta, Puslitbang Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2000, h. 63, Imam Nugraha, "Muslim Rohingya yang Terjajah di Negeri Sendiri" *Republika*, 20 April 1997.
4. Tentang pelbagai konflik etnis tersebut lihat, Josef Silverstein, *Burma*, dalam, George McTurman Kahin (ed.), *Government and Politics of Southeast Asia*, New York, Cornell University Press, 1959, h. 139-142.
5. Dalam sejarahnya, setelah dikuasai oleh komunitas Hindu mulai tahun 100 hingga 957 M, wilayah ini selanjutnya didominasi oleh kekuatan Muslim selama 350 tahun (1430 hingga 1784 M) sebelum akhirnya dikuasai oleh komunitas Budha terhitung sejak 1784 hingga saat ini. Terkait alur sejarah ini, lihat, Mohamed Ashraf Alam, *Historical Background of Arakan*, dalam, <http://ric.rohingyainfo.com>, atau Habib Siddiqui, *A Long History of Injustice Ignored: Rohingya: The Forgotten People of Our Time*, dalam, <http://the-americanmuslim.org/> diakses 10 Maret 2009.
6. United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, *Burma [Myanmar]: Information on the Situation of Rohingyas*, 28 March 2001, atau lihat <http://www.unhcr.org/refworld/country> diakses 8 Maret 2009.
7. Aye Chan, *The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)*, SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005.
8. Zaw Min Hitu, *Human Rights Abuses and Discrimination on Rohingyas*, Burmese Rohingya Association in Japan/BRAJ, Tokyo, Japan, 2003, h. 12.
9. Terkait dengan penggunaan gelar keislaman, Hall mencatat, bahwa gelar keislaman digunakan hampir oleh penerus Naramaikhla. Pada 1434, Min Khari, penggantinya, menggunakan nama Ali Khan, begitu juga Basawpya, berkuasa sejak 1459, juga memberlakukan hal yang sama kepada seluruh penerusnya yang berkuasa hingga 1666. D. G. E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya, Pe-

- nerbit Usaha Nasional, t.t., h. 360-361.
10. Zaw Min Htut, *op. cit.*, h.13.
 11. Terkait penjelasan tentang skema serta latarbelakang perubahan ini lihat, Norman.G. Owen, *op. cit.*, h. 497-500.
 12. Laporan FIDH, "Burma, Repression, Discrimination and Ethnic Cleansing in Arakan", International Federation of Human Rights, edisi April 2000, h. 117-20.
 13. Riza Sihbudi (ed.), *op. cit.*, h. 88.
 14. M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, (terj.), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 206-208,
 15. Situasi ini berulang terjadi dan sebagai catatan, seringkali pihak junta memanfaatkan situasi ini untuk membangkitkan anti Islam. Contoh pada 1996, ketika terjadi aksi perusakan masjid dan pembakaran al-Qur'an di wilayah utara propinsi Mandalay oleh para biksu, pihak junta justru mendukung aksi tersebut. Lihat, "Agenda Panjang Muslim Rohingya", *Republika*, 20 April 1997, atau <http://www.burmacampaign.org.uk/> diakses 4 Maret 2009.
 16. Imam Nugraha "Agenda Panjang Muslim Rohingya", *Republika*, 20 April 1997.
 17. Imam Nugraha, "Muslim Rohingya yang Terjajah di Negeri Sendiri" *Republika*, 20 April 1997.
- Daftar Pustaka**
- Bixler, Norma, *Burma, a Profil*, London, Praeger Publishers, Inc. 1971.
- Burmese Rohingya Association in Japan/BRAJ, Tokyo, Japan, 2003.
- Hall, D. G. E., *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, t.t.
- <http://ric.rohingyainfo.com>,
<http://theamericanmuslim.org/>
<http://www.burmacampaign.org.uk/>
<http://www.unhcr.org/refworld/count>
International Federation of Human Rights, edisi April 2000.
- Kahin, George McTuman (ed.), *Government and Politics of Southeast Asia*, New York, Cornell University Press, 1959.
- Kettani, M. Ali, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kyi, Aung San Suu, *Freedom from Fear and other Writings*, England, Penguin Book Ltd. 1995.
- Owen, Norman G. (ed.), *The Emergence of Modern Southeast Asia, A New History*, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2005.
- Republika*, 20 April 1997.
- Sihbudi, Riza (ed.), *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara, Kasus Moro, Pattani dan Rohingya*, Jakarta, Puslitbang Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2000.
- SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005.